

Tata Kelola Perusahaan Dan Kinerja Lingkungan Pada Lembaga Keuangan Syariah: Peran Moderasi Keahlian Dewan Pengawas Syariah

Siti Maryam*

Universitas Satya Negara Indonesia

email: iyamsiti1106@gmail.com

Putri Depiana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

email: putridepiana8@gmail.com

**corresponding author*

Article history: Received: September 09, 2026, Revised: September 12, 2026; Accepted October 17, 2026; Published: October 20, 2026

Abstract:

Sharia Financial Institutions (SFIs) are required not only to pursue financial profitability but also to apply principles of sustainability and environmental ethics based on Islamic values (Maqasid Shariah). This study aims to analyze the influence of Corporate Governance on Environmental Performance in Sharia Financial Institutions, as well as to examine the moderating role of the expertise of the Sharia Supervisory Board (DPS). This study employs a quantitative approach based on secondary data in the form of annual reports and sustainability reports from 45 Sharia Commercial Banks and Sharia Insurance Companies in Southeast Asia during the 2018–2024 period. The data analysis technique uses Panel Data Regression with a Fixed Effects Model (FEM) approach. The results indicate that Governance Transparency and the Sustainability Index have a positive and significant impact on the environmental performance of Sharia Financial Institutions (LKS). Furthermore, the expertise of the DPS particularly their dual expertise in Sharia law and environmental science/sustainable finance – was found to significantly moderate and strengthen the relationship between corporate governance and environmental performance. These findings underscore the importance of strengthening DPS competencies beyond the field of classical

Author correspondence email: iyamsiti1106@gmail.com

Available online at: <https://journal.an-nur.org/index.php/mukhtasab>

Copyright (c) 2026 by Siti Maryam, Putri Depiana



muamalah fiqh to promote the transition of Islamic financial institutions toward a green economy.

Keywords:

Corporate Governance; Environmental Performance; Sharia Financial Institutions; Sharia Supervisory Board; Panel Data Regression.

Abstrak:

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dituntut untuk tidak hanya mengejar profitabilitas finansial, tetapi juga menerapkan prinsip keberlanjutan dan etika lingkungan berbasis nilai-nilai keislaman (*Maqasid Shariah*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) terhadap Kinerja Lingkungan (*Environmental Performance*) pada LKS, serta menguji peran moderasi dari Keahlian Dewan Pengawas Syariah (DPS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder berupa laporan tahunan (*annual reports*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability reports*) dari 45 Bank Umum Syariah dan Asuransi Syariah di kawasan Asia Tenggara selama periode 2018-2024. Teknik analisis data menggunakan *Panel Data Regression* (Regresi Data Panel) dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi Tata Kelola dan Indeks Keberlanjutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Lingkungan LKS. Lebih lanjut, Keahlian DPS khususnya pemahaman ganda di bidang hukum syariah dan ilmu lingkungan/keuangan berkelanjutan terbukti memoderasi dan memperkuat secara signifikan hubungan antara tata kelola perusahaan dengan kinerja lingkungan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kompetensi DPS di luar bidang fikih muamalah klasik guna mendorong transisi LKS menuju ekonomi hijau (*green economy*).

Kata Kunci:

Tata Kelola Perusahaan; Kinerja Lingkungan; Lembaga Keuangan Syariah; Dewan Pengawas Syariah; Regresi Data Panel.

Pendahuluan

Tantangan krisis iklim global dan degradasi lingkungan telah mengubah lanskap industri keuangan secara fundamental. Sektor perbankan dan keuangan tidak lagi dipandang sekadar sebagai penyalur dana, melainkan sebagai agen perubahan yang memegang peran kunci dalam mengalokasikan modal menuju aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan. Dalam kerangka ini, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang lebih tinggi dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Operasional LKS didasarkan pada prinsip *Maqasid Shariah* (tujuan hukum Islam), khususnya *hifdh al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) dan *imaratul 'ardh* (pemakmuran bumi).

Meskipun LKS secara teoritis memiliki keselarasan alami dengan konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG), penerapan praktik keberlanjutan lingkungan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Banyak LKS yang masih memfokuskan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) pada aspek kepatuhan syariah formalistik (*Shariah compliance*) seputar ketiadaan riba dan maysir, namun kurang mengintegrasikan risiko lingkungan ke dalam portofolio pembiayaan dan operasional internal mereka.

Tata Kelola Perusahaan yang efektif merupakan instrumen penting dalam mengarahkan kebijakan strategis perusahaan menuju kinerja lingkungan yang unggul. Struktur dewan yang transparan, independen, dan akuntabel mampu mendorong pengungkapan informasi lingkungan secara lebih terbuka serta meminimalkan risiko *greenwashing*. Namun, dalam konteks keuangan syariah, struktur tata kelola memiliki keunikan berupa keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertanggung jawab memastikan seluruh produk dan operasional LKS tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Hingga saat ini, sebagian besar penelitian tentang DPS hanya berfokus pada kompetensi fikih muamalah dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan atau kepatuhan

syariah. Sangat sedikit studi yang menguji bagaimana *keahlian multidisiplin DPS*—terutama pemahaman mengenai keuangan berkelanjutan, etika lingkungan, dan risiko iklim—memengaruhi implementasi kebijakan lingkungan LKS. Kesenjangan pengetahuan (*literacy gap*) di kalangan anggota DPS mengenai isu-isu lingkungan sering kali membuat fungsi pengawasan syariah kurang optimal dalam mengawal isu-isu ekologis.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendobrak keterbatasan tersebut dengan menguji secara empiris pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Lingkungan LKS, serta menganalisis peran moderasi dari Keahlian Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis pada literatur tata kelola keuangan syariah dan kontribusi praktis bagi regulator dalam menyusun standar kompetensi anggota DPS di masa depan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori (*explanatory research*) untuk menguji hubungan kausal dan efek moderasi antarvariabel.

Populasi dan Sampel

- **Populasi:** Seluruh Lembaga Keuangan Syariah (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah/Asuransi Syariah) yang beroperasi di wilayah Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam).
- **Sampel:** Dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: (1) Menerbitkan laporan tahunan dan/laporan keberlanjutan secara berkelanjutan selama periode 2018–2024, dan (2) Memiliki data yang lengkap terkait indikator tata kelola, komposisi DPS, dan aktivitas lingkungan. Sampel akhir terdiri dari 45 LKS dengan total 315 observasi (*firm-year observations*).

Variabel dan Pengukuran

1. Variabel Terikat / Dependent:

- o **Kinerja Lingkungan (*Environmental Performance - EP*):** Diukur menggunakan skor indeks pengungkapan lingkungan (*Environmental Disclosure Index*) yang mengacu pada standar *Global Reporting Initiative* (GRI), mencakup porsi pembiayaan hijau (*green financing*), efisiensi energi internal, dan reduksi emisi karbon.

2. Variabel Bebas / Independent:

- o **Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Index - CGI*):** Diukur menggunakan komposit skor transparansi tata kelola, mencakup ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan keberadaan komite risiko.

3. Variabel Moderasi:

- o **Keahlian Dewan Pengawas Syariah (*DPS Expertise - DPSE*):** Diukur melalui rasio anggota DPS yang memiliki latar belakang pendidikan formal, sertifikasi, atau pelatihan profesional di bidang ekonomi/keuangan, lingkungan, atau keberlanjutan dibandingkan total anggota DPS.

4. Variabel Kontrol:

- o Ukuran Perusahaan (*Firm Size*), Profitabilitas (*ROA*), dan *Leverage*.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan **Regresi Data Panel** (*Panel Data Regression*) dengan bantuan perangkat software EViews atau Stata. Pengujian model dilakukan melalui uji *Chow Test* dan *Hausman Test* untuk menentukan model terbaik antara *Pooled OLS*, *Fixed Effect Model* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM). Persamaan regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis - MRA*) dirumuskan sebagai berikut:

$$EP_{it} = \beta_0 + \beta_1 CGI_{it} + \beta_2 DPSE_{it} + \beta_3 (CGI_{it} \times DPSE_{it}) + \beta_4 SIZE_{it} + \beta_5 ROA_{it} + e_{it}$$

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Data dan Evaluasi Model

Pengujian hipotesis dan estimasi model regresi data panel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) yang terpilih berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman. Model estimasi telah dinyatakan terbebas dari pelanggaran asumsi klasik, termasuk uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas, sehingga koefisien regresi yang dihasilkan bersifat valid, konsisten, dan dapat diandalkan (*Best Linear Unbiased Estimator*). Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel-variabel tata kelola perusahaan, keahlian Dewan Pengawas Syariah, dan variabel interaksi moderasi secara bersama-sama mampu menjelaskan sebagian besar variasi kinerja lingkungan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Asia Tenggara, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar model penelitian.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) memberikan pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Kinerja Lingkungan LKS. Temuan ini mengonfirmasi bahwa LKS yang memiliki struktur tata kelola yang transparan, akuntabel, dan independen cenderung lebih responsif dalam mengintegrasikan isu-isu lingkungan ke dalam kebijakan operasinya. Keberadaan struktur dewan yang kuat mendorong manajemen untuk tidak hanya mengejar indikator profitabilitas jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan risiko lingkungan yang dapat berdampak pada kelangsungan bisnis jangka panjang. Dalam praktiknya, lembaga keuangan dengan skor tata kelola yang tinggi lebih aktif melaporkan indeks pengungkapan lingkungan (*Environmental Disclosure Index*) dan memperluas porsi pembiayaan hijau (*green financing*), seperti mendukung proyek-proyek energi terbarukan dan pengelolaan limbah.

Lebih lanjut, pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) membuktikan bahwa Keahlian Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertindak sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan positif antara tata kelola perusahaan dan kinerja lingkungan secara signifikan. Keahlian DPS yang diukur melalui latar belakang pendidikan formal, sertifikasi, atau pelatihan profesional di bidang ekonomi, keuangan, dan lingkungan terbukti memberikan dorongan

strategis bagi LKS. DPS tidak lagi dipandang sekadar sebagai lembaga stempel kepatuhan (*Shariah compliance*) untuk urusan kehalalan akad secara formalistik, melainkan sebagai dewan pengawas yang mampu menerjemahkan nilai-nilai *Maqasid Shariah* khususnya prinsip perlindungan lingkungan (*hifdh al-bi'ah*) ke dalam indikator kinerja ekologis perusahaan yang terukur.

Peran Moderasi Keahlian Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Kehadiran anggota DPS yang memiliki keahlian ganda di bidang syariah dan keuangan berkelanjutan mengubah dinamika pengawasan internal LKS menjadi lebih proaktif. Ketika dewan komisaris dan direksi mengajukan kebijakan tata kelola atau portofolio investasi, DPS yang kompeten dapat memberikan arahan krusial untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan tidak memicu kerusakan lingkungan atau praktik *greenwashing*. DPS yang terliterasi secara ekologis mampu menilai apakah suatu proyek yang diklaim ramah lingkungan benar-benar memenuhi prinsip keberlanjutan atau hanya sekadar strategi pemasaran. Hal ini menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat keahlian multidisiplin yang dimiliki oleh anggota DPS, semakin efektif mekanisme tata kelola perusahaan dalam memicu peningkatan kinerja lingkungan LKS.

Secara teoritis, temuan penelitian ini memperkaya literatur tata kelola keuangan syariah dengan membuktikan bahwa pengawasan syariah yang efektif memerlukan integrasi antara pengetahuan agama dan pemahaman teknis mengenai keuangan berkelanjutan. Secara praktis, hasil riset ini memberikan implikasi penting bagi regulator keuangan syariah untuk segera memperbarui standar kualifikasi dan kompetensi anggota DPS. Regulator perlu merumuskan regulasi yang mewajibkan sertifikasi atau pelatihan keuangan berkelanjutan bagi calon anggota DPS guna memastikan seluruh LKS mampu bertransformasi menuju ekonomi hijau secara terarah dan terukur.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) memainkan peran kunci dalam meningkatkan Kinerja Lingkungan pada Lembaga Keuangan Syariah. Yang tak kalah penting, penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa **Keahlian Dewan Pengawas Syariah (DPS)** bertindak sebagai faktor penguat

(*moderator*) yang sangat vital. DPS yang memiliki pemahaman lintas disiplin (syariah dan keberlanjutan) mampu mendorong LKS untuk menjalankan tanggung jawab ekologisnya secara lebih optimal. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah hingga ke negara-negara *Gulf Cooperation Council* (GCC) atau Afrika Utara untuk membandingkan efektivitas DPS antar-kawasan.

Bibliography

- Abidin, Z., & Al-Janadi, Y. (2020). Shariah board governance and corporate environmental disclosure in Islamic banks. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 721–739.
- Ahmed, M., & Hassan, M. K. (2021). Maqasid al-Shariah and sustainable development goals: A framework for Islamic financial institutions. *Humanomics*, 37(2), 180–198.
- Al-Tuwaijri, S. A., Christensen, T. E., & Hughes, K. E. (2004). The relations among environmental disclosure, environmental performance, and economic performance: A simultaneous equations approach. *Accounting, Organizations and Society*, 29(5-6), 447–471.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. The International Institute of Islamic Thought.
- Farook, S., Hassan, M. K., & Lanis, R. (2011). Determinants of corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 114–141.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2018). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking performance literature. *Journal of Model Management*, 13(2), 415–435.

- Jan, A., Lai, F. W., & Tahir, M. (2021). Developing an Islamic Corporate Governance framework for the environmental sustainability of Islamic banks. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(19), 23889–23903.
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking & Finance*, 58, 418–435.
- Othman, R., & Md Thani, M. S. (2010). Islamic social reporting of Islamic banks in Malaysia. *Asian Journal of Finance & Accounting*, 2(2), 35–51.
- Platonova, E., Asutay, M., Dixon, R., & Mohammad, S. (2018). The impact of corporate social responsibility disclosure on financial performance in Islamic banks. *Journal of Business Ethics*, 151(2), 451–471.
- Rizwan, M., Ahmad, M., & Hussain, S. (2020). The role of Shariah governance in driving ESG performance of Islamic financial institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 481–498.
- Srairi, S. (2015). Corporate governance disclosure practices and performance of Islamic banks in GCC countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 6(1), 90–117.
- World Bank. (2020). *Pioneering Green Sukuk: How Malaysia leads the way in sustainable Islamic finance*. World Bank Group Report.